

## **ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT DALAM BERPENDIDIKAN FORMAL DI MASA PANDEMI COVID 19**

**Alif Dewantara<sup>1</sup> M. Roby Nur Akbar<sup>2</sup>**  
Universitas Merdeka Malang<sup>1,2</sup>  
alif.dewantara@unmer.ac.id<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

*Penelitian yang dilakukan di provinsi Kalimantan Timur ini ingin melihat seberapa efektif belanja pemerintah dalam memberikan kontribusi akses pendidikan yang merata di provinsi Kalimantan Timur dimasa Pandemi Covid-19 dengan menggunakan sampel data survey sosial dan ekonomi nasional yang diambil dari sampel jumlah anak di usia sekolah dan dibagi kuantil pendapatan orang tua yang anaknya berusia sekolah dimana ada sejumlah 2821 rumah tangga yang anaknya berusia sekolah dan dibagi dalam anggaran yang diberikan oleh pemerintah berupa stimulus pendidikan hasil menunjukkan bahwa sebaran akses pendidikan formal di provinsi Kalimantan Timur dinikmati merata disetiap level pendapatan orang tua yang anaknya mengakses pendidikan baik pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah ke atas dan hasil lain dari peran pemerintah efektif dimana anggaran yang diberikan pemerintah sudah memberikan kontribusi dalam akses pendidikan dan belanja pemerintah bersifat progresif di 3 jenjang pendidikan ini menunjukkan belanja pemerintah pro terhadap masyarakat miskin dan tentu saja peran pemerintah efektif dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam berpendidikan formal di provinsi Kalimantan Timur di Masa pandemi covid 19 Covid 19, belanja pemerintah, progresif, usia bersekolah*

---

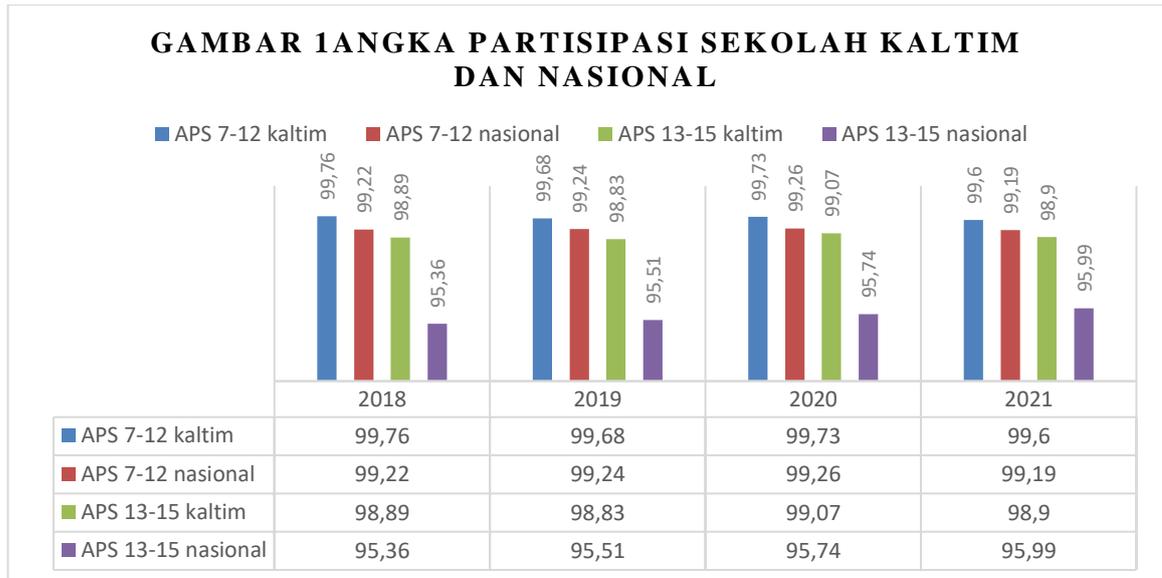
### **PENDAHULUAN**

Sebelum dimulainya vaksinasi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberlakukan pembatasan yang berkaitan dengan kerumunan termasuk sector sector vital yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas yaitu di sector pendidikan. Pembatasan yang dilakukan pemerintah mempengaruhi aspek pengajaran dimana kegiatan pengajaran yang biasanya di lakukan disekolah harus diliburkan dan mulai menerapkan pembelajaran dalam jaringan atau daring yang dilakukan dirumah dengan menggunakan teknologi internet. Kegiatan ini menuntut dunia pendidikan berinovasi menerapkan pembelajaran yang efektif agar peningkatan pembelajaran dan kualitas pendidikan dapat terpenuhi dan program wajib belajar 12 tahun juga sudah bisa diterapkan dalam keterbatasan pandemi ini.

Salah satu daerah di Indonesia yang memberikan kontribusi pada pendidikan adalah provinsi Kalimantan Timur. Meskipun ditengah pandemic covid 19 provinsi

Kalimantan timur memiliki aksesibilitas pendidikan yang baik dimana hampir semua penduduk berusia sekolah mampu berpartisipasi dalam mengenyam pendidikan hal itu dilihat dari 2 indikator dalam melihat seberapa besar aksesibilitas masyarakat dalam berpendidikan yaitu APS dan APM yang sudah diatas nasional.

APS yang digunakan untuk melihat seberapa besar angka bersekolah anak dibandingkan yang tidak bersekolah sudah menunjukkan rasio yang baik bahkan hampir semua disetiap jenjang pendidikan dapat bersekolah hal itu terlihat di gambar 1

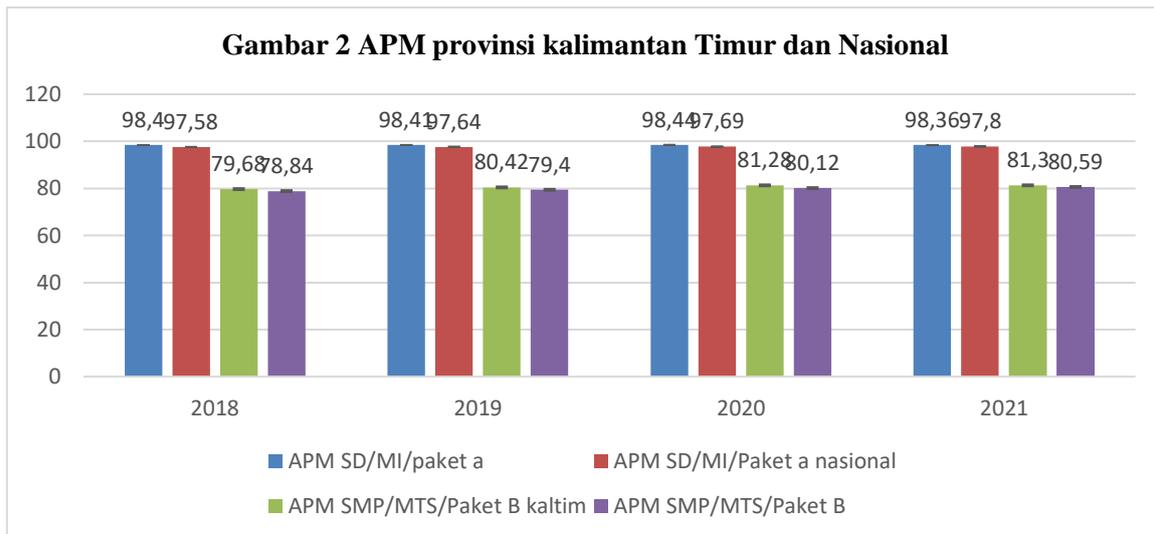


Sumber : Data BPS diolah 2022

Jika melihat gambar 1 menunjukkan bahwa disetiap jenjang pendidikan hampir semua dapat bersekolah bahkan angkanya diatas angka nasional meskipun terdapat penurunan angka bersekolah di 2020 ke 2021 pada saat transisi pandemic covid 19 namun tidak mempengaruhi anak anak untuk tetap bersekolah hal itu terlihat dari gambar dimana kehadiran anak yang bersekolah sudah sangat baik di setiap usia jenjang pendidikan dalam bersekolah meskipun memang masih ada sejumlah anak yang tidak bersekolah di berbagai jenjang pendidikan namun angka persentasenya tidak terlalu besar. Ini menunjukkan bahwa meskipun pandemic covid 19 terjadi namun laju akses anak bersekolah tetap baik dan dapat bersekolah tanpa memperhatikan kesesuaian umur pada berbagai jenjang pendidikan.

Sementara jika melihat indicator lain yang melihat ketepatan usia sekolah dengan jenjang pendidikannya juga menunjukkan progres yang baik dimana ketepatan usia sekolah di provinsi Kalimantan Timur sudah melebihi skala nasional artinya keberhasilan pendidikan disetiap usia sekolah juga sangat baik di masa pandemic

covid 19 hal itu dapat dilihat di gambar 2



Sumber: Data BPS diolah 2022

Jika melihat gambar 2 menunjukkan bahwa APM provinsi Kalimantan Timur sudah sangat baik dalam memberikan aksesibilitas berpendidikan hal itu terlihat dari gambar 2.2 bahkan peningkatan partisipasi pendidikan selalu meningkat di setiap tahun padahal tahun 2020 ke 2021 menjadi awal perubahan tatanan pendidikan akibat mewabahnya pandemic covid 19 namun tidak mempengaruhi aksesibilitas dalam berpendidikan di provinsi Kalimantan Timur hal itu terlihat dari persentase kesesuaian umur sekolah dengan jenjang pendidikannya yang sangat baik bahkan sudah melebihi skala nasional.

Jika melihat peningkatan APM dan APS provinsi Kalimantan Timur yang sangat baik di masa pandemic covid 19 ini menunjukkan bahwa pemberlakuan transisi pembelajaran dari luring menjadi dalam jaringan tidak menghambat akses pendidikan di provinsi Kalimantan Timur padahal pandemic covid 19 di khawatirkan akan mempengaruhi peningkatan akses pendidikan mengingat tidak hanya di sector pendidikan saja yang terkena dampaknya namun sector perekonomian yang menopang dalam kehidupan masyarakat juga berdampak kedua sector ini tentu menjadi korelasi mengingat dalam sector pendidikan ada biaya yang ditanggung orang tua dalam menyekolahkan anaknya yaitu biaya langsung jika pendapatan orang tua terkena imbas dari pandemic covid 19 khususnya masyarakat miskin tentu saja mempengaruhi akses pendidikan pada anak yang bisa jadi membuat anak tidak melanjutkan pendidikan namun di provinsi Kalimantan Timur di masa pandemic covid 19 tingkat indikator APS dan APMnya sangat tinggi di masa pandemic covid

19 oleh karena kajian penelitian ini tertarik untuk mengkaji seberapa efektif peran pemerintah hadir dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam berpendidikan formal di provinsi Kalimantan timur mengingat pandemic yang terjadi tentu peran pemerintah dibutuhkan dalam hal ini dalam menstimulus pendidikan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pendidikan sebagai price excludible public good**

Salah satu penyebab munculnya peran pemerintah dalam perekonomian adalah karena adanya kegagalan pasar dimana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat secara efisien atau pasar gagal menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien akhirnya hadir pemerintah dalam mengalokasikan secara efisien (khusnaini, Moh 2014.) gagalnya pasar dalam perekonomian mengharuskan pemerintah ikut campur dalam pengalokasian barang tersebut salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan *Price excludible public* atau barang swasta campuran dimana dalam istilahnya adalah barang yang dalam sifatnya adalah tidak ada persaingan dalam mengkonsumsinya namun dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang tersebut ada hak exclusion disana dalam pengertian adalah ada harga dalam penggunaannya salah satu contohnya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan barang yang bersifat *price excludible public good* jika dilepas pada mekanisme pasar atau pure barang privat tentu saja tidak semua orang dapat menikmati pendidikan karena barang privat menghendaki permintaan dan penawaran suatu produk dan terbentuklah harga dalam penyediaannya (Hyman 2011). Jika dalam penetapan harga didasarkan pada kesanggupan membayar tentu saja tidak semua orang dapat menikmati pendidikan padahal pendidikan merupakan salah satu barang yang penting dalam hal peningkatan produktivitas yang dapat memutus lingkaran setan kemiskinan (todaro dan smith, 2013). Jika seperti itu maka ada sebagian orang yang sulit mengakses pendidikan maka dibutuhkan peran pemerintah disana maka dari sifatnya yang *price excludible public good* yang tentu penyediannya bisa melalui pemerintah dengan biaya yang didasarkan pada kewajiban dalam hal penggunaannya karena jika berbicara konsep ekonomi public tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi proses pengadaan stimulus tergantung dari keputusan politis mengingat keputusan politis memengaruhi bagaimana besarnya keputusan belanja public diambil mengingat tidak ada mekanisme pasar yang otomatis memisahkan sektor sektor public yang lebih besar (Hal David 2010).

### **Biaya tidak langsung dalam investasi modal manusia**

Dalam berpendidikan ada sejumlah biaya yang dikeluarkan dalam mengenyam pendidikan yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah sejumlah biaya yang ditanggung dalam berpendidikan seperti biaya spp, seragam sekolah, buku dan biaya lain yang terknis dalam pembelajaran. Namun biaya tersebut sebanding dengan tingkat produktivitas yang didapat. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan sejumlah pendapatan yang hilang karena memiliki bersekolah dibandingkan bekerja akan tetapi ketika memilih bersekolah daripada bekerja tentu akan meningkatkan produktivitas yang nanti digunakan pada saat bekerja dikemudian hari yang tentu akan menjadi investasi dalam peningkatan upah (Todaro dan Smith 2013).

### **Manfaat Biaya Sosial dan Manfaat Biaya Pribadi**

Menurut Todaro dan Smith (2013) biaya pribadi merupakan biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan tingkat pendidikan. Manfaat pribadi merupakan manfaat ekonomi yang di peroleh seseorang setelah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu. Biaya sosial merupakan biaya yang ditanggung oleh semua masyarakat untuk mendanai pendidikan dari dasar sampai ke pendidikan tinggi. Hal ini karena biaya ini dibiayai oleh pajak dan penggunaan pendidikan didasarkan oleh keputusan politik dalam mensubsidi hal tersebut. sedangkan Manfaat sosial yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena terdapat orang yang berpendidikan, seperti terdapat masalah yang bisa diselesaikan dengan baik karena orang berpendidikan memiliki pemahaman lebih di bandingkan dengan yang tidak berpendidikan dengan kata lain keputusan berpendidikan tentu akan memberikan dampak manfaat pribadi dan juga manfaat social di masyarakaat dan tentu akan memperbaiki kesehjahtraan pribadi maupun keluarga.

### **Investasi Modal Manusia**

Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan juga dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran ganda pendidikan sebagai input dan sekaligus output menjadikan pendidikan sangat penting artinya dalam pembangunan ekonomi (Todaro dan Smith 2013).

### **METODE PENELITIAN**

## **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini didasarkan pada pendekatan kuantitatif dimana pendekatan kuantitatif menurut Wiratha (2006) adalah pendekatan yang bersifat falsafah positivism artinya pendekatan itu terdiri dari ilmu yang valid, dibangun dengan dasar empiris, terukur dan dalam isinya terdapat logika matematika, ada eksperimentasi, dapat di deskripsikan dan terdapat survey. Dalam hal ini belanja pendidikan yang akan diolah oleh peneliti akan dijelaskan dengan hasil yang digambarkan dalam angka dimana pendekatan kualitatif akan membantu mendalami sebuah kajian dari belanja pendidikan yang terdapat dalam tabel tabel serta data yang telah diolah sehingga mengkaji lebih dalam secara teoritis histori dari hasil manfaat dari belanja pendidikan di provinsi kalimantan Timur. Dan diharapkan hasilnya akan menjadi sebuah evaluasi dan arahan bagi pembuat kebijakan dalam mengalokasikan anggarannya lebih efisien dan adil dan merata dalam hal memberikan stimulus khususnya masyarakat miskin sehingga belanja tersebut dapat lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi pendidikan.

## **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini ingin mengetahui seberapa efektif belanja pendidikan di provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas pada masyarakat dalam pendidikan formal di masa pandemic Covid-19 maka dari itu data yang digunakan peneliti ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain misal berupa intansi dan dokumen terkait maka data sekunder dalam penelitian ini adalah data laporan anggran dana Bantuan operasional sekolah (BOS) pada ketiga jenjang pendidikan yaitu jenjang pendidikan dasar dan setingkatnya, jenjang pendidikan menengah pertama dan jenjang pendidikan menengah keatas data ini terdapat pada website Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. dan pengguna layanan pendidikan yang terdapat pada data survey social ekonomi nasional atau SUSENAS tahun 2021

## **Metode Analisis**

### **Benefit Incidence Analisis, Kurva Lorenz dan indeks gini**

BIA adalah metode yang digunakan untuk mengukur anggaran belanja pemerintah dalam setiap program dan kegiatan. Metode BIA sangat efektif digunakan dalam mengukur apakah anggaran terdistribusi merata efektif dan efisien

dimana metode ini bisa melihat siapa yang paling besar mendapatkan manfaat dari anggaran pemerintah yang dibagi dalam kuantil pendapatan (Fernandes dan Velarde, 2012).

Metode BIA dapat sangat mudah dipahami khususnya pada belanja pendidikan karena pendidikan merupakan sektor penting dalam peningkatan produktifitas dan mengakibatkan eksternalitas positif bagi suatu negara. Metode BIA juga sangat mudah digunakan dimana metode ini dapat mengukur belanja pemerintah apakah bersifat regresif atau progresif dikatakan regresif apakah manfaat belanja lebih besar dinikmati oleh masyarakat kaya atau menengah keatas dan ini berarti kebijakan pemerintah tidak pro terhadap masyarakat miskin dan sebaliknya dikatakan progresif artinya manfaat belanja lebih besar di nikmati oleh masyakat miskin ini berarti anggaran pemerintah khususnya pendidikan pro terhadap masyarakat miskin (Damery,2000). Adapun untuk melihat sebaran anggaran pemerintah khususnya anggaran pendidikan digunakan merata oleh berbagai jenjang pendidikan digunakan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS dimana dana BOS diasumsikan semua mendapatkan dana BOS di berbagai jenjang pendidikan baik pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah keatas di berbagai kuantil pendapatan untuk melihat sebaran anggaran terdistribusi merata dan manfaatnya lebih besar di berikan kepada masyarakat miskin dimana langkah langkah dalam penggunaan benefit incidence analisis adalah sebagai berikut

1. Hitunglah biaya rata-rata per unit dalam penyediaan barang publik dalam hal ini pendidikan dengan cara membagi belanja pemerintah dengan pengguna dari belanja pemerintah tersebut sebelum dibagi belanja pemerintah sudah dikurangi dengan *cost recovery* dan pengeluaran pribadi yg dilakukan pengguna pendidikan.
2. Jelaskan biaya rata rata per unit tadi menjadi biaya rata rata penyedia belanja publik.
3. Masukkan pengguna pendidikan dalam klasifikasi sesuai pendapatannya dimana dapat diukur dengan menggunakan ukuran kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan dapat diambil data berupa konsumsi dan pendapatan sedangkan buat klasifikasi pengguna pendidikan dapat diambil dari survey keluarga. Kedua hal tersebut dapat digunakan dalam klasifikasi pengguna layanan pendidikan. biasanya dalam BIA klasifikasi tersebut dalam bentuk kuantil atau desil.

4. Setelah membagi berdasarkan kuantil dan desil dari pengguna layanan tentukan distribusi dari manfaat dengan mengkalikan rata-rata manfaat yang didapat dengan jumlah pengguna pendidikan yang telah diklasifikasikan dalam kuantil dan desil. Dalam hal ini biaya penyedia layanan publik tidak ada perbedaan pada setiap kelompok yang diklasifikasi.
5. Langkah terakhir adalah melihat distribusi manfaat yang diterima pada setiap kelompok yang dibagi berdasarkan kuantil dan desil. Hasil ini sangat penting untuk melihat seberapa efektif belanja pendidikan pada BIA terdistribusi misalnya belanja pendidikan dasar manfaatnya dapat dirasakan lebih pada kuantil masyarakat termiskin maka belanja pendidikan sudah efektif.

Langkah langkah tersebut menggambarkan bagaimana manfaat anggaran diterima di berbagai kuantil pendapatan sehingga hasil akhir kita mengetahui apakah anggaran tersebut bersifat progresif dan regresif. Adapun untuk mengukur apakah terdistribusi merata atau tidak kita bisa menggunakan kurva Lorenz dalam melihat distribusi manfaat belanja pendidikan yang diterima di berbagai kuantil pendapatan

BIA digambarkan dalam bentuk kurva pendistribusian belanja pemerintah terhadap penerima belanja dalam hal ini jumlah murid pada jenjang pendidikan formal berada pada sumbu horizontal kurva Lorenz sementara anggaran pemerintah berada pada garis vertical.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Distribusi pendapatan masyarakat dalam peningkatan partisipasi pendidikan dan peran pemerintah**

Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi pendidikan adalah kemudahan dalam biaya yang ditanggung, dimana ada biaya yang ditanggung dalam berpendidikan yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya terkait operasional dalam hal ini meliputi biaya seragam, pembayaran spp dan lain lain yang terkait dengan proses pembelajaran. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan sejumlah pendapatan yang hilang karena memilih bersekolah dibandingkan bekerja, namun dampak dari hilangnya pendapatan yang hilang akan diinvestasikan di pendidikan sehingga orang yang berpendidikan akan meningkatkan produktivitas dan tentu mengganti sejumlah biaya tidak langsung yang hilang tadi (Todaro dan Smith 2013).

Jika dalam berpartisipasi pendidikan dikenakan sejumlah biaya salah satunya biaya langsung maka akses dalam berpendidikan akan sulit didapat bagi

mereka yang tidak mampu membayar sejumlah biaya pendidikan khususnya pada masyarakat miskin yang sulit mengakses pendidikan dasar, menengah dan menengah keatas karena keterbatasan dana dalam membayar sejumlah biaya pendidikan tersebut dan ditambah gejala pandemic covid 19 yang membiasakan dengan sisten kebiasaan baru tentu akan sulit jika tidak di stimulus oleh bantuan dari pemerintah maka akan berdampak makin banyak anak yang berusia sekolah yang orang tuanya tidak mampu sulit dalam mengakses pendidikan. jika itu terjadi maka angka kemiskinan akan semakin terus bertambah karena penduduk miskin tersebut melahirkan generasi yang tidak dibekali dengan sejumlah pendidikan. Padahal proses pendidikan merupakan salah satu cara dalam memutus lingkaran setan kemiskinan dimana dengan berproduktivitas dan menghasilkan pengetahuan yang baik akan memberikan investasi modal manusia dan berdampak pada kesejahtraan karena menerima sejumlah penghasilan yang baik maka dari itu pentingnya pendidikan dalam hal memperbaiki tarah hidup pribadi maupun social.

Salah satu provinsi yang memiliki tingkat pendapatan perkapita yang sangat baik yang digunakan dalam mengakses pendidikan adalah provinsi Kalimantan Timur. Dimana jika melihat sebaran akses pendidikan semua dapat menikmati diberbagai level pendapatan orang tua yang anaknya mengakses pendidikan baik itu pendidikan dasar, menengah dan menengah ke atas. Jika melihat sebaran akses pendidikan yang dikategorikan dari berbagai kuantil pendapatan orang tua yang anaknya mengakses pendidikan menunjukkan tingkat pemerataan yang baik artinya tidak hanya penduduk kaya yang tercermin di kuantil 4 dan 5 saja yang anaknya dapat mengakses pendidikan namun penduduk miskin yang anaknya mengakses pendidikan juga mendapatkan akses pendidikan yang baik baik itu dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan menengah ke atas

Pada jenjang pendidikan dasar misalnya meskipun ditengah pandemic covid 19 yang memberlakukan pembelajaran secara daring namun akses pendidikan khususnya pendidikan dasar tetap bisa dinikmati merata pada setiap lapisan pendapatan Orang tua yang anaknya mengakses pendidikan dasar hal ini terlihat dari sebaran akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang sudah merata di setiap lapisan pendapatan orang tua yang anaknya mengakses pendidikan. Ini menunjukkan adanya progress peningkatan akses pendidikan pada lapisan penduduk miskin dimana anaknya telah mengenyam pendidikan di kategori jenjang pendidikan dasar telah mampu meningkat bahkan angka partisipasinya tinggi ini menunjukkan bahwa tidak

hanya masyarakat yang berpenghasilan ke atas saja yang dapat menikmati pendidikan namun masyarakat miskinpun anaknya juga dapat merata dalam mengakses pendidikan. Data di tabel 4.1 menjelaskan bahwa sebaran akses pendidikan dasar telah dinikmati merata oleh anak-anak yang dibagi berdasarkan kuantil pendapatan orang tua yang anaknya mengakses pendidikan dan juga manfaat anggaran yang diberikan pemerintah lebih besar dinikmati oleh masyarakat menengah kebawah dan miskin lihat tabel 1

**Tabel 1 distribusi pengeluaran perkapita pada setiap penduduk**

pendapatan	Pendidikan dasar			
		Jumlah partisipasi	total	anggaran
kuantil	1	78	5,90	7,142
	2	365	27,59	33,423
	3	624	47,17	57,140
	4	218	16,48	19,962
	5	38	2,86	3,480
Jumlah		1323	100	121,148

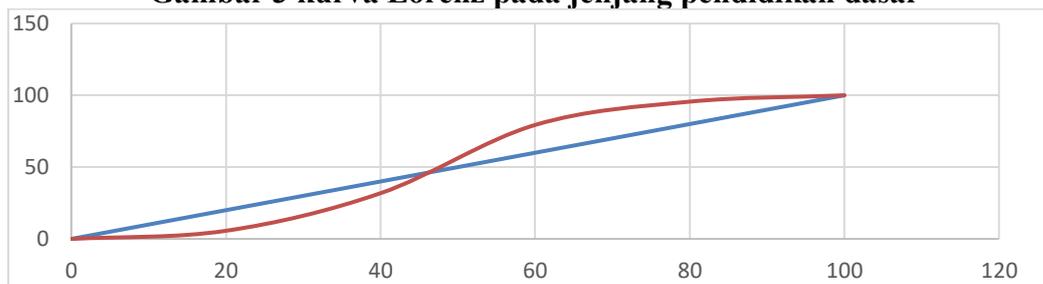
Sumber: Data Susenas 2021, 2022 (Data diolah)

Jika melihat data di tabel 1 hasil menunjukkan bahwa 40% penduduk miskin di kuantil 1 dan 2 yang anaknya mengakses pendidikan sudah dapat mengakses pendidikan sebesar 31,82% dibandingkan 40% penduduk kaya di kuantil 4 dan 5 yang anaknya mengakses pendidikan hanya sebesar 20,63% dari total jumlah anak yang mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Sementara 20% dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan menengah kebawah yang ditunjukkan kuantil 3 dimana dalam mengakses pendidikan anaknya sebesar 47,55% dari total siswa dan siswi yang mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Sementara jika melihat peran pemerintah dalam memberikan anggaran pada akses pendidikan dasar sudah sangat baik dimana dari total anggaran dana BOS yang diberikan oleh pemerintah sudah terdistribusi merata dengan baik. Total anggaran dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pada jenjang pendidikan dasar sebesar 121,147,764,000 (Kemendikbud.go.id). anggaran itu sudah terdistribusi merata. bahkan manfaat anggaran lebih besar dinikmati oleh 40% masyarakat miskin dibandingkan 40% masyarakat kaya dalam mengakses pendidikan dimana 40% masyarakat miskin menerima manfaat sebesar 40,565,000,000 dibandingkan 40% masyarakat kaya sebesar 23,443,000,000. Sementara sisanya diberikan pada 20%

masyarakat menengah kebawah yang anaknya mengakses pendidikan sebesar 57,140,000,000. Jika melihat kalkulasi tersebut ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah bersifat progresif artinya belanja pemerintah pro terhadap masyarakat miskin dan sebaran akses pendidikan merata di setiap kuantil pendapatan orang tua yang anaknya mengakses pendidikan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahid Asgar dan Mudassar Zahra (2012) Dipakistan dimana belanja pendidikan pada jenjang pendidikan dasar bersifat progresif dan terdistribusi merata hal yang sama juga dilakukan oleh selowsky dalam juswanto (2005) di kolombia dan Maerman dalam Juswanto (2005) di Malaysia dimana belanja pendidikan dasar yang dianggarkan pemerintah di Colombia dan Malaysia bersifat progresif artinya pada jenjang pendidikan dasar memang rata rata belanja bersifat progresif sama halnya dengan provinsi Kalimantan Timur meskipun dalam kondisi pandemic covid 19 tetap belanja pendidikan bersifat progresif. hal itu juga bisa di lihat dari kurva Lorenz dimana gambar Lorenz menunjukkan pemerataan sempurna lihat gambar Lorenz 3

**Gambar 3 kurva Lorenz pada jenjang pendidikan dasar**



Sumber Data susenas 2021, 2022 (Data diolah)

Jika melihat gambar 3 menunjukkan bahwa Kurva Lorenz yang berwarna orange semakin mendekati garis diagonal yang berwarna biru yaitu garis yang menunjukkan pemerataan sempurna dimana garis Lorenz menunjukkan pemerataan yang sempurna mendekati titik 0 semakin mendekati titik 0 maka semakin sempurna garis Lorenz dalam menunjukkan kemerataannya artinya akses pendidikan yang di dapat telah di nikmati merata pada setiap tingkat pendapatan masyarakat dalam mengakses pendidikan sekolah dasar dengan kata lain peran pemerintah efektif dalam memberikan akses pendidikan yang baik pada jenjang pendidikan dasar padahal tantangan di masa pandemi covid 19 sangat berat dirasakan apalagi dengan adaptasi pembelajaran baru yang membatasi jarak dalam mengakses pendidikan namun pemerintah tetap komitmen dalam memberikan pendidikan dasar yang baik hingga akses pendidikan dinikmati merata disetiap lapisan pendapatan masyarakat ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama juga memberikan akses pendidikan yang merata di berbagai kuantil pendapatan orang tua yang anaknya mengakses pendidikan dimana akses pendidikan hampir sama dinikmati di berbagai kuantil pendapatan orang tua yang anaknya mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama dan anggaran pemerintah juga lebih besar dinikmati masyarakat menengah kebawah dan miskin yang seharusnya mendapat manfaat terbesar dari anggaran pemerintah mengingat beratnya biaya langsung yang ditanggung dalam berpendidikan. Tabel 2 menjelaskan bagaimana sebaran akses pendidikan dan anggaran pemerintah dalam menstimulus jenjang pendidikan menengah pertama tersebut

**Tabel 2 distribusi pengeluaran perkapita yang anaknya mengakses pendidikan dan manfaat anggaran yg diberikan pemerintah pada setiap lapisan pendapatan pada jenjang pendidikan menengah pertama dimasa pandemic covid 19**

pendapatan	menengah pertama			
		Jumlah partisipasi	total	anggaran
kuantil	1	51	6,19	3,611
	2	214	26	15,153
	3	384	46,66	27,191
	4	135	16,40	9,559
	5	39	4,75	2,765
Jumlah		823	100	58,279

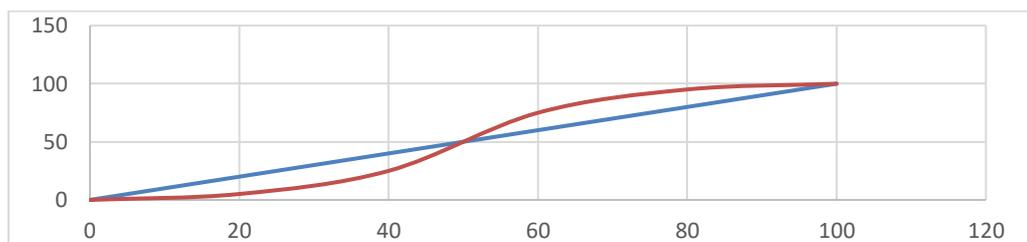
Sumber data Susenas 2021,2022 (Data diolah)

Jika melihat data ditabel menunjukkan bahwa akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama sudah sangat merata dimana di berbagai kuantil pendapatan orang tua yang anaknya mengakses jenjang pendidikan menengah pertama sudah dapat mengakses pendidikan dengan baik khususnya masyarakat menengah kebawah dan miskin. Jika kita melihat masyarakat miskin menunjukkan progress yang baik dimana 40% penduduk miskin dapat mengakses pendidikan 32,19% dari total anak yang mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama angka ini lebih besar dibandingkan 40% penduduk kaya yang mengakses pendidikan dimana 40% penduduk kaya mengakses pendidikan hanya sebesar 21,15% dari total anak yang mengakses pendidikan sisanya dinikmati 20%

penduduk menengah ke bawah sebesar 46,66% dari total anak yang mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama.

Jika melihat sebaran akses pendidikan sudah sangat ,merata bahkan penduduk miskin mampu berpartisipasi lebih dalam akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama hal ini juga menunjukkan peran pemerintah efektif dalam memberikan stimulus anggaran pada masyarakat miskin mengingat pada jenjang pendidikan menengah pertama belanja terbesar di nikmati oleh masyarakat menengah kebawah dan miskin dalam mengakses pendidikan hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah bersifat progresif artinya belanja pemerintah pro terhadap masyarakat miskin khususnya dalam mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawuli gaddah Allistair Munro (2011) dighana dimana untuk pendidikan menengah pertama belanja pemerintah bersifat progresif hal ini sejalan dengan anggaran pendidikan yang diberikan oleh jenjang pendidikan menengah pertama dimana anggaran pendidikan bersifat progrsif lihat di tabel 4.2 manfaat anggaran lebih besar di nikmati oleh masyarakat miskin dalam memberikan stimulus agar tetap mengakses pendidikan. Meskipun akses pendidikan lebih besar dinikmati oleh masyarkaak miskin namun sebarannya tetap merata hal ini terlihat dari kurva Lorenz atau gini ratio dalam melihat sebaran pendapatan dan akses pendidikan dimana garis Lorenz menunjukkan pemerataan yang sempurna lihat gambar 4

**Gambar 4 Kurva Lorenz pada jenjang pendidikan menengah pertama**



Sumber: Data Susenas 2021, 2022 (Data diolah).

Pada gambar Lorenz diatas jelas garis Lorenz yang berwarna orange mendekati garis diagonal yang berwarna biru sebaran ini tentu baik tidak ada ketimpangan disana dan dapat disimpulkan pada jenjang pendidikan menengah pertama sebaran akses pendidikan merata dan peran pemerintah efektif dalam menstimulus pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama.

Pada jenjang pendidikan menengah ketaas porsi terbaik dalam kemertaan ditunjukkan pada jenjang pendidikan menengah keatas dimana porsi masyarkaak

miskin dan kaya dalam mengakses pendidikan sama dalam mengakses pendidikan ini menunjukkan di level penuntasan wajib belajar 12 tahun sudah tercermin dalam program yang dijalankan pemerintah provinsi Kalimantan padahal dimasa pandemic covid 19 ini memberlakukan pembatasan pemebelajran dalam jaringan namun partisipasi pendidiian masih sangat baik dan merata pada jennag pendidikan menengah ke atas hal itu dapat dilihat di tabel 3 menjelaskan pemerataan pada jenjang pendidikan menengah ke atas dalam mengakses pendidikan di berbagai kuantil pendapatan orang tua

**Tabel 3 Distribusi pengeluaran perkapita yang anaknya mengakses pendidikan dan manfaat anggaran yang diberikan pemerintah.**

pendapatan	menengah keatas			
		Jumlah partisipasi	total	anggaran
kuantil	1	38	5,62	1,876
	2	139	20,59	6,862
	3	330	48,89	16,292
	4	138	20,46	6,813
	5	30	4,44	1,482
Jumlah		675	100	33,325

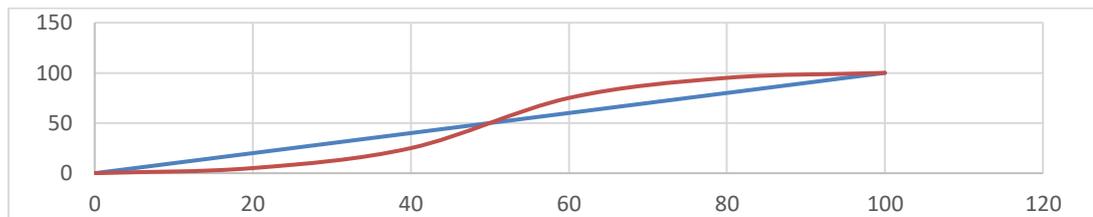
Sumber: Data Susenas 2021,2022 (Data diolah

Jika melihat data ditabel 3 menunjukkan bahawa sebaran akses pendidikan sangat merata pada jejang pendidikan menengah ke atas dimana 40 % penduduk miskin dapat mengakses pendidikan sebesar 26,21% dari total persentase anak yang mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah keatas anga ini juga hampir sama persentase kemerataanya pada penduduk kaya yang anaknya mengakses pendidikan dimana 40% penduduk kaya dalam mengakses pendidikan sebesar 24,91% dari total yang mengakse pendidikan sisanya dinikmati 20% penduduk menengah kebawah yang anaknya mengakses pendidikan sebear 48,88% dari total yang mengakse pendidikan.

Sementara jika melihat anggaran yang diberikan pemerintah sudah terdistribusi merata pada jenjang pendidikan menengah ke atas dan total anggaran dana BOS yang diberikan pemerintah pada jenjang pendidikan menengah ke atas sebesar 33,325,000,000 (Kemendikbud.go.id). dimana porsi tersebut tersebar merata diberbagai kuantil pendapatan pada jenjang pendidikan menengah ke atas. Di jenjang pendidikan menengah ke atas menunjukkan pemerataan paling sempurna dimana 40 % penduduk miskin mendapatkan anggaran sebesar 8,738,000,000 kurang

lebih sama dengan 40 % penduduk kaya dimana mendapatkan anggaran sebesar 8,295,000,000 sementara sisanya dinikmati 20 % penduduk menengah kebawah sebesar 16,292,000,000. Meskipun begitu belanja pemerintah tetap bersifat progresif dimana manfaat anggaran masih besar dinikmati masyarakat miskin. Secara pemerataan pada jenjang pendidikan menengah ke atas menunjukkan pemerataan sempurna hal itu terlihat dari Kurva Lorenz pada gambar 5

**Gambar 5 Kurva Lorenz pada jenjang pendidikan menengah keatas**



Sumber : Data susenas 2021,2022 (Data diolah)

Jika melihat gambar 2.3 pada kurva Lorenz jenjang pendidikan menengah keatas kurvanya sangat sempurna dimana porsi disetiap kuantil menerima porsi yang sangat merata ini menunjukkan sebaran akses pendidikan terdistribusi merata disetiap lapisan masyarakat yang anaknya mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah keatas dan manfaat terbesar masih dinikmati penduduk menengah kebawah dan miskin namun akses pendidikan juga sama dinikmati masyarakat kaya ini menunjukkan peran pemerintah efektif pada jenjang pendidikan menengah ke atas.

Jika melihat akses pendidikan di berbagai kuantil pendapatan orang tua yang anaknya mengakses pendidikan baik itu pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah keatas sudah terdistribusi secara merata meskipun ada biaya yang ditanggung dalam mengakses pendidikan namun stimulus pemerintah sangat efektif dalam hal pemberian akses pendidikan formal di provinsi Kalimantan Timur. Meskipun ditengah pandemic covid 19 dengan adanya pembatasan pembejaraan tatap muka dan juga upaya untuk tetap mengakse pendidika di tengah keterbatasan tidak membuat provinsi kalimanan timur gagal dalam hal mengakses pendidikan terbukti dari 3 jenjang pendidikan yaitu pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah ke atas semua dapat mengakses pendidikan di berbagai kuantil pendapatan orang tua yang anaknya mengakses pendidikan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pemerintah efektif dalam menstimulus pendidikan karena akses pendidikan dinikmati merata disetiap lapisan pendapatan masyarakat yang anaknya mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah keatas.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Pandemic covid 19 telah merubah adaptasi baru dalam cara pembelajaran di dunia pendidikan dengan perubahan adaptasi pembelajaran dari tatap muka menjadi dalam jaringan karena menjaga jarak untuk memutus pandemic di khawatirkan akan berdampak pada peningkatan aksesibilitas dalam berpendidikan di provinsi Kalimantan timur namun kenyataan dari hasil penelitian yang dilakukan tidak seperti yang dibayangkan dimana di tengah pandemic covid 19 akses pendidikan di nikmati merata di tiap lapisan pendapatan yang anaknya mengakses pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan dasar, menengah pertama dan keatas hal itu tidak lepas dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam menstimulus biaya langsung yang apabila di bebani oleh orang tua yang anaknya mengakses pendidikan tentu menjadi berat apalagi ditengah ketidakpastian perekonomian yang terkena dampak dari pandemi covid 19. Peran pemerintah efektif dalam memberikan stimulus di 3 jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah ke atas dimana dari 3 jenjang pendidikan tersebut dari berbagai kuantil pendapatan yang anaknya mengakses pendidikan dapat menikmati pendidikan secara merata khususnya penduduk miskin yang mengakses pendidikan dimana mereka hadir dan ikut berpartisipasi dalam pendidikan kehadiran itu penting untuk memutus lingkaran setan kemiskinan yang akan terus berputar apabila tanpa dibekali pendidikan dan minim produktivitas

### **SARAN**

Bagi pemerintah perlu membuat road map adaptasi pembelajaran baru di tengah pandemic covid mengingat pengukuran kualitas pendidikan dalam pembelajaran baru di masa pandemic covid 19 tidak dikur dalam kajian penelitian ini sosialisasi internet khususnya di pedesaan menjadi hal vital karena pembelajaran di masa pandemic covid 19 akan sering dalam jaringan dan dibutuhkan konektivitas baik agar informasi akses pendidikan dapat diberikan sempurna oleh anak peserta didik. Sedangkan buat peneliti selanjutnya sepertinya perlu dikaji bagaimana sebaran akses pendidikan dari desa dan kota mengingat dengan adaptasi baru pembelajaran di tengah pandemic covid 19 tentu mempengaruhi penduduk desa yang perlu adaptasi dalam pembelajaran dalam jaringan hal ini penting agar penduduk desa mampu mengambil peran dalam mengakses pendidikan meskipun di tengah pandemic covid 19 ini.

**Daftar Pustaka**

- Asgar, Z, dan Zahra, M, 2012 “Benefit Incidence Analisis Of Publik Spending On Education In Pakistan Using PSLM Data” The Labore Journal Of Economic, PP 111-136
- Badan Pusat Statistik. “Angka Partisipasi Sekolah Nasional Tahun 2018-2021” <https://www.bps.go.id/> diakses 18 oktober 2022
- Badan Pusat Statistik. “Angka Partisipasi Murni Nasional Tahun 2018-2021” <https://www.bps.go.id/> diakses 18 oktober 2022
- Badan Pusat Statistik. “Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021” <https://www.bps.go.id/> diakses 18 oktober 2022
- Badan Pusat Statistik. “Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021” <https://www.bps.go.id/> diakses 18 oktober 2022
- Demery, Lionel (2000), “Benefit incidence A practioner’s Guide”, Poverty and social development group Africa Region The world Bank, <http://info.worldbank.org>
- Demery, Lionel,2000. “The Effects of Taxation and Spending on Inequality and poverty Chapter 15” 293-317
- Fernandez, Luisa dan Velarde, Rashiel, 2012 “Who Benefit From Social Assistance In The Philippines: Evidence From The Latest National Household Surveys” The World Bank Group No 4.
- Gaddah, M, dan Munro, A, 2011. “The Rich Or The Poor: Who Gains From Public Education Spending In Ghana” National Graduate Institute For Policy Studies, volume 1, 1-34
- Hall, David and Public Service Internasional. Budiarti. Indah (Editor) dan Tanto Supriyanto (Penerjemah) 2010. “Mengapa Kita Butuh Belanja Publik” PSIRU, Business School, Universitas of Greenwich, Park Row, London No SE109LS, UK
- Hyman, David N, 2011. “Public Finance A contemporary Application Of theory to Policy. 10<sup>th</sup> Edition”. Cengage Learning, USA
- Juswanto, Wawan, 2010. Distribution of Foverment Expenditure and Demand for Education Service. “the case of Indonesia”,.2-24
- Khusnaini, Moh,2018. “Keuangan Daerah”, UB Press, Malang.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia “ Anggaran dana BOS provinsi Kalimantan Timur” [https:// www.kemendikbud.go.id/](https://www.kemendikbud.go.id/) diakses 18 oktober 2022
- Todaro, Micheal P, 2000. “Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga , Edisi Ketujuh”, Erlangga , Jakarta
- Wiratha, I, Made, 2006. “Metode Penelitian Sosial Ekonomi”. CV Andi Offset, Yogyakarta.